

Integrasi Filsafat, Pancasila dan Teologi dalam Masyarakat Majemuk

Luciana Haryanto¹, Daniel Suharto²

¹⁻² Sekolah Tinggi Teologi Kadesi Bogor, Indonesia

*Penulis Korespondensi: lucianaharyanto@gmail.com

Abstract. *Indonesia's diversity in ethnicity, culture, religion, and language demands an approach that can simultaneously address intellectual, spiritual, and national dimensions. The integration of philosophy, Pancasila, and theology becomes essential in responding to this complex reality. Philosophy strengthens critical and reflective thinking, helping individuals interpret differences with awareness and avoid hasty judgments, which is crucial in reducing social tension and fostering dialogue. Pancasila, as the nation's ideological foundation, provides an ethical-political framework that guarantees unity, freedom, and justice for all citizens regardless of background. Theology complements these foundations by offering transcendental ethics and spiritual guidance that shape compassionate attitudes toward others and the environment. A contextual and inclusive theological perspective supports religion's role as a source of enlightenment and encourages interfaith solidarity in a pluralistic society. When these three elements are integrated into education, public policy, and social culture, they help form a society that is intellectually critical, socially inclusive, and spiritually resilient. Core values such as empathy, justice, equality, and shared responsibility can develop more strongly in daily interactions. Although challenges such as identity crises, misinformation, and online intolerance remain, collaboration between the state and civil society is needed to maintain an inclusive public sphere. Through strengthening philosophical education, deepening appreciation of Pancasila, and advancing contextual theology, Indonesia can build a just and harmonious society.*

Keywords: *Integration; Pancasila; Philosophy; Plural Society; Theology.*

Abstrak. Keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa Indonesia menuntut pendekatan yang mampu menyentuh dimensi intelektual, spiritual, dan kebangsaan secara bersamaan. Integrasi filsafat, Pancasila, dan teologi menjadi esensial dalam merespons realitas kompleks ini. Filsafat memperkuat pemikiran kritis dan reflektif, membantu individu memaknai perbedaan dengan kesadaran dan menghindari penilaian yang terburu-buru, yang krusial dalam meredam ketegangan sosial dan mendorong dialog. Pancasila, sebagai landasan ideologi bangsa, menyediakan kerangka etika-politik yang menjamin persatuan, kebebasan, dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang. Teologi melengkapi landasan-landasan ini dengan menawarkan etika transendental dan bimbingan spiritual yang membentuk sikap welas asih terhadap sesama dan lingkungan. Perspektif teologis yang kontekstual dan inklusif mendukung peran agama sebagai sumber pencerahan dan mendorong solidaritas antaragama dalam masyarakat pluralistik. Ketika ketiga unsur ini terintegrasi ke dalam pendidikan, kebijakan publik, dan sosial budaya, ketiganya membantu membentuk masyarakat yang kritis secara intelektual, inklusif secara sosial, dan tangguh secara spiritual. Nilai-nilai inti seperti empati, keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama dapat dikembangkan lebih kuat dalam interaksi sehari-hari. Meskipun tantangan seperti krisis identitas, misinformasi, dan intoleransi daring masih ada, kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil diperlukan untuk menjaga ruang publik yang inklusif. Melalui penguatan pendidikan filsafat, pendalaman apresiasi Pancasila, dan pemajuan teologi kontekstual, Indonesia dapat membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Kata kunci : Filsafat; Integrasi; Masyarakat majemuk; Pancasila; Teologi.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya, suku, agama, dan keyakinan yang sangat tinggi. Dengan lebih dari 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, dan enam agama resmi, Indonesia menghadirkan realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Keberagaman ini, meskipun menjadi kekayaan budaya dan spiritual yang luar biasa, juga menyimpan potensi konflik apabila tidak dikelola dengan baik (Sulaeman & Kurniawan, 2020). Dalam konteks

masyarakat majemuk, diperlukan dasar-dasar nilai yang mampu menjadi jembatan di tengah perbedaan, sehingga pluralitas tidak berubah menjadi sumber perpecahan.

Filsafat, Pancasila, dan Teologi merupakan tiga pilar penting yang dapat membentuk masyarakat yang adil, harmonis, dan toleran. Filsafat memberikan kemampuan reflektif dan kritis untuk memahami realitas dan nilai-nilai hidup bersama; Pancasila menjadi ideologi nasional yang menegaskan semangat kebersamaan dan keadilan sosial; sementara Teologi menghadirkan dimensi moral dan spiritual yang memperkuat kesadaran transendental manusia (Haryatmoko, 2022). Ketiga unsur ini bila disinergikan mampu menjadi fondasi konseptual dan praktis dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat majemuk yang damai dan berkeadilan.

Tantangan globalisasi, arus ideologi radikal, serta meningkatnya intoleransi agama menuntut adanya pendekatan multidisipliner untuk menjaga harmoni sosial. Oleh sebab itu, integrasi antara filsafat, Pancasila, dan Teologi menjadi sangat penting dalam menghadirkan paradigma kebangsaan yang humanis dan transformatif (Suseno, 2020). Sinergi ini juga menjadi jawaban terhadap kecenderungan pragmatisme dan individualisme yang dapat menggerus solidaritas sosial bangsa Indonesia (Manullang, 2021).

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, pluralitas bukan hanya fakta sosiologis, tetapi juga menjadi panggilan moral dan intelektual untuk merancang strategi integrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan. Melalui kekuatan reflektif filsafat, inklusivitas ideologis Pancasila, dan kedalaman moral teologi, masyarakat Indonesia dapat membangun peradaban yang tangguh menghadapi dinamika zaman (Siahaan, 2023). Ketiga pendekatan ini, bila dipadukan dengan bijak, tidak hanya memperkuat kohesi sosial tetapi juga mempertegas identitas nasional yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dengan demikian, filsafat memberikan arah berpikir kritis, Pancasila menghadirkan nilai-nilai kebangsaan yang mempersatukan, dan teologi menuntun pada pemaknaan spiritual yang mendalam. Integrasi ketiganya menjadi strategi konseptual untuk menjaga harmoni dalam keberagaman, serta memperkuat daya tahan bangsa menghadapi arus global yang cepat dan penuh tantangan (Riyanto, 2021).

2. KAJIAN TEORITIS

Filsafat: Landasan Rasional dan Etis

Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani *philosophia* yang berarti “cinta akan kebijaksanaan.” Filsafat bukan hanya disiplin teoretis, tetapi juga cara hidup yang menekankan refleksi kritis terhadap eksistensi, nilai, dan realitas (Riyanto, 2021). Dalam

konteks keimanan Kristen, prinsip ini sejalan dengan ajaran Alkitab tentang hikmat: “Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya!” (Amsal 4:6). Ayat ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan (hikmat) memiliki fungsi etis dan rasional, serupa dengan semangat berfilsafat yang mendorong manusia untuk mencari kebenaran dengan kerendahan hati dan ketekunan. Bahkan dalam Kitab Pengkhotbah (Pkh. 12:13), manusia diajak untuk menyadari bahwa inti dari kebijaksanaan sejati adalah takut akan Allah dan menaati perintah-Nya, sehingga filsafat dan iman tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi (Haryono, 2020).

Dalam masyarakat majemuk, filsafat berfungsi sebagai alat berpikir kritis dan reflektif untuk memahami perbedaan pandangan dan menghindari absolutisme ideologis (Kleden, 2019). Pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan semboyan *sapere aude* (“beranilah berpikir sendiri”) menegaskan pentingnya otonomi rasional manusia. Dalam konteks Indonesia yang plural, semangat ini mengajarkan keterbukaan terhadap pandangan lain tanpa kehilangan prinsip moral dan keyakinan diri. Filsafat dengan demikian menumbuhkan sikap kritis dan toleran, yang menjadi landasan penting bagi masyarakat demokratis (Titus et al., 2019).

R. F. Beerling (dalam Suseno, 2020) menegaskan bahwa filsafat tidak hanya menanyakan hal-hal partikular, melainkan menelusuri hakikat realitas secara menyeluruh—mengenai asas, prinsip, dan makna keberadaan. Pendekatan semacam ini memungkinkan manusia memahami dirinya dan dunia secara rasional serta menemukan dasar etis dalam tindakan sosial. Pemikiran Hans-Georg Gadamer (2004) melalui teori hermeneutika filosofis juga memperkaya wacana pluralitas. Dalam karyanya *Truth and Method*, Gadamer menekankan pentingnya “fusi cakrawala” (*fusion of horizons*)—yaitu dialog antartradisi yang melahirkan pemahaman bersama, bukan dominasi satu pandangan atas yang lain. Konsep ini sangat relevan dalam membina komunikasi antaragama dan antarbudaya di Indonesia (Riyanto, 2022).

Filsafat juga berperan dalam menumbuhkan kesadaran kritis terhadap struktur sosial dan politik. Dengan berpikir filosofis, masyarakat diajak mempertanyakan sistem yang tidak adil serta mendorong transformasi menuju keadilan dan kesejahteraan bersama (Manullang, 2021). Tradisi filsafat eksistensial, misalnya, menekankan tanggung jawab moral individu untuk menciptakan makna hidupnya sendiri di tengah kebebasan dan keterbatasan (Tillich, 2019). Sikap ini sejalan dengan ajaran teologis tentang kebebasan manusia yang bertanggung jawab di hadapan Allah (Plantinga, 2020).

Lebih jauh, filsafat berfungsi sebagai ruang dialog antara rasionalitas dan iman. Dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial, filsafat membentuk kesadaran etis dan kemampuan

reflektif yang mendorong keterbukaan terhadap “yang lain.” Dengan pendekatan hermeneutik, manusia belajar memahami makna dan pengalaman orang lain tanpa prasangka, sebagaimana ditekankan Gadamer dan Ricoeur (Kurniawan, 2022). Pendekatan ini sangat penting untuk membangun empati dan solidaritas sosial di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama Indonesia.

Sejak zaman Yunani kuno, filsafat telah menjadi sarana manusia untuk merenungkan hakikat kebenaran, keadilan, dan keberadaan Tuhan. Dalam masyarakat kontemporer, filsafat tetap menjadi alat penting untuk menjaga keseimbangan antara nalar dan iman, antara kebebasan berpikir dan tanggung jawab moral (Mangunhardjana, 2020). Filsafat juga menumbuhkan kesadaran bahwa pluralitas adalah fakta ontologis yang harus diterima dan dirayakan, bukan dihapuskan. Dengan demikian, berpikir filosofis membantu membangun masyarakat yang inklusif, kritis, dan bermartabat (Siahaan, 2023).

Dalam konteks kehidupan berbangsa, filsafat memberikan dasar rasional untuk mempertemukan nilai-nilai ideologis Pancasila dan nilai-nilai spiritual teologis. Ia menjadi jembatan antara dimensi logis dan transendental kehidupan manusia (Suseno, 2021). Filsafat bukan sekadar teori, melainkan praksis pembebasan—membuka ruang bagi transformasi sosial yang adil dan humanis (Darmawan, 2022). Dengan membudayakan berpikir filosofis, masyarakat Indonesia dapat mengembangkan kemampuan berdialog secara terbuka dan membangun konsensus etis untuk hidup berdampingan secara damai (Wahyudi, 2024).

Dengan demikian, filsafat adalah landasan rasional dan etis yang membentuk kesadaran kritis, membuka ruang dialog, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam masyarakat majemuk, filsafat berperan sebagai *modus vivendi* yang mengajarkan keterbukaan, keadilan, dan kebijaksanaan di tengah keragaman yang tak terhindarkan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan hasil data dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk kepentingan penelitian tersebut, yang mana hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Metodologi penelitian juga merupakan langkah penelitian yang menjelaskan cara dilakukannya penelitian yang dapat dilaksanakan agar hipotesis penelitian dapat teruji secara ilmiah, empirik, dan rasional. Penelitian ini menggunakan “metode penelitian kualitatif dengan menggali sumber-sumber pustaka melalui Alkitab, buku-buku, jurnal dan daftar pustaka lainnya. Metode ini juga sesuai dengan kondisi di mana peneliti hendak berfokus pada suatu kejadian tertentu dari perspektif yang lebih luas dan menyeluruh. Peneliti menggunakan pendekatan deskripsi analisis yaitu awalnya dengan

mencari data dari beberapa teks penting kemudian diteliti dan kemudian peneliti melihat dan mengutip pandangan beberapa pakar, sehingga menghasilkan pemaparan pemahaman mengenai Integrasi Filsafat, Pancasila dan Teologi Dalam Masyarakat Majemuk.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun ketiga unsur tersebut memiliki potensi besar untuk menciptakan harmoni, kenyataannya integrasi ini menghadapi tantangan yang tidak kecil. Beberapa di antaranya adalah: Radikalisme agama, yang mengklaim kebenaran tunggal dan menolak pluralitas. Politik identitas, yang mengeksploitasi perbedaan untuk tujuan kekuasaan. Ketimpangan sosial, yang menimbulkan kecemburuan dan konflik antar kelompok. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang simultan: pendidikan kritis berbasis filsafat, internalisasi nilai-nilai Pancasila secara praksis, serta pengembangan teologi yang membebaskan dan membangun solidaritas sosial. Integrasi ini bisa terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan:

Integrasi Praktis dalam Bidang Pendidikan, Sosial, dan Politik

Setelah memahami dasar konseptual dari filsafat, Pancasila, dan teologi, tahap selanjutnya adalah mengintegrasikan ketiganya dalam kehidupan nyata. Bidang-bidang utama yang menjadi medan strategis integrasi adalah pendidikan, kehidupan sosial, dan politik.

Pendidikan

Pendidikan merupakan tempat yang paling ideal untuk menanamkan nilai-nilai filosofis, ideologis, dan spiritual. Integrasi dapat dilakukan dengan cara: Mengajarkan filsafat sejak dini, terutama filsafat moral, logika, dan estetika, agar peserta didik terbiasa berpikir kritis dan reflektif. Pendidikan Pancasila tidak sekadar doktrin ideologis, melainkan melalui dialog, studi kasus, dan proyek sosial yang menanamkan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan demokrasi. Pendidikan agama diarahkan untuk membentuk pribadi yang inklusif dan berempati, serta membuka ruang untuk memahami agama lain dalam semangat toleransi. Beberapa sekolah dan perguruan tinggi telah menerapkan pendidikan multikultural dan dialog antariman, namun skalanya masih terbatas dan cenderung seremonial. Perlu langkah sistemik dari pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menjadikan pendekatan ini sebagai bagian integral dari kurikulum nasional.

Kehidupan Sosial

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, integrasi ini dapat diwujudkan melalui: Forum-forum lintas agama, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menjadi media dialog dan kerja sama sosial. Kegiatan sosial lintas iman, seperti bakti sosial, bantuan bencana, atau kegiatan lingkungan bersama, yang mengedepankan semangat gotong royong

dan kemanusiaan. Kampanye kesadaran publik melalui media sosial, seni, dan budaya yang mempromosikan nilai-nilai etika dan pluralisme. Masyarakat sipil dan organisasi keagamaan memainkan peran penting dalam mendesain dan melaksanakan program-program tersebut secara konsisten dan berkelanjutan.

Politik

Di ranah politik, integrasi filsafat, Pancasila, dan teologi bisa menjadi basis dalam membangun etika politik yang sehat. Pancasila harus menjadi pedoman etis dalam menyusun kebijakan publik. Para pejabat publik dan politisi hendaknya memiliki kesadaran filosofis dan moral agar tidak terjebak pada politik transaksional dan kekuasaan semata. Teologi publik juga harus mendorong umat beragama untuk menjadi pemilih yang cerdas dan tidak terprovokasi oleh politik identitas. Demokrasi yang sehat tidak akan tumbuh tanpa warga negara yang dewasa secara intelektual dan spiritual.

Tantangan dan Peluang Integrasi di Era Globalisasi dan Digitalisasi

Integrasi antara filsafat, Pancasila, dan teologi tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ia berada dalam konteks zaman yang terus berubah, salah satunya ditandai oleh era globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang massif. Perubahan ini membuka peluang-peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan.

Tantangan Globalisasi

Globalisasi membawa pengaruh lintas batas dalam bentuk budaya populer, gaya hidup konsumtif, kapitalisme global, serta krisis identitas. Dalam konteks ini, ada kecenderungan lunturnya nilai-nilai lokal dan nasional, termasuk nilai-nilai Pancasila, karena digantikan oleh nilai-nilai pragmatis dan individualistik. Beberapa tantangan yang perlu diwaspadai meliputi: Komersialisasi nilai, di mana segala sesuatu diukur dari aspek ekonomi semata. Dekonstruksi identitas budaya, terutama pada generasi muda yang terpapar budaya luar tanpa penyaring kritis. Disorientasi moral dan spiritual, karena semakin banyak individu yang tercerabut dari akar budayanya sendiri. Untuk menjawab tantangan ini, filsafat dapat membantu membangun kesadaran kritis terhadap dominasi ideologi pasar; Pancasila dapat menjadi jangkar identitas nasional; dan teologi dapat memperkuat akar spiritualitas yang membumi dan kontekstual.

Tantangan Era Digital

Kemajuan teknologi informasi, terutama media sosial, membawa dampak besar dalam cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi. Namun, alih-alih memperkuat toleransi, dunia digital sering menjadi ruang yang memperburuk fragmentasi sosial. Masalah yang muncul antara lain: Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) berbasis agama, suku,

dan ras. Radikalisme daring, di mana kelompok ekstrem memanfaatkan internet untuk menyebarkan ideologi kekerasan. Disinformasi dan hoaks, yang menyesatkan publik dan memicu konflik horizontal. Filsafat dapat memperkuat literasi digital kritis, yakni kemampuan menyaring informasi berdasarkan kebenaran dan rasionalitas. Pancasila dapat menjadi pedoman dalam etika bermedia sosial. Sementara teologi dapat menekankan etiket komunikasi berbasis kasih, keadilan, dan kejujuran dalam ruang digital.

Peluang Kolaborasi Digital

Di sisi lain, era digital juga menghadirkan peluang besar bagi integrasi nilai-nilai luhur. Platform digital dapat digunakan untuk: Mengampanyekan pluralisme dan perdamaian melalui konten kreatif, video edukatif, dan diskusi daring. Mengembangkan pendidikan nilai berbasis daring yang menjangkau komunitas terpencil. Menghubungkan jaringan lintas iman dan lintas negara, sehingga memperluas cakrawala toleransi. Lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah perlu memanfaatkan teknologi ini secara strategis. Misalnya, program "Pendidikan Karakter Berbasis Digital" dapat menjadi gerakan nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai filsafat, Pancasila, dan teologi ke dalam konten edukatif online.

Peran Negara dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Integrasi

Agar integrasi ini dapat terwujud secara nyata, diperlukan peran aktif dari negara dan masyarakat sipil. Keduanya harus bekerja sama dalam menciptakan sistem sosial-politik yang mendukung nilai-nilai kebersamaan dan toleransi.

Peran Negara

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk: Menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi dan kekerasan. Mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan, hukum, dan kebijakan publik. Mendorong kurikulum pendidikan yang menyatukan pendekatan rasional, moral, dan spiritual. Program seperti Moderasi Beragama dan Revitalisasi Pendidikan Pancasila adalah langkah awal yang baik, tetapi perlu diikuti dengan evaluasi, pendalaman kurikulum, dan pelatihan bagi pendidik agar tidak sekadar bersifat formalitas.

Peran Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil, termasuk organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, media, dan komunitas lokal, memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel untuk: Menyelenggarakan pelatihan pluralisme, dialog antaragama, dan penguatan etika publik. Menyuarakan isu-isu keadilan sosial dan HAM berdasarkan nilai-nilai agama yang transformatif. Menjadi motor pembaharuan budaya yang inklusif dan membumi.

Mengembangkan literasi Pancasila dan spiritualitas publik melalui media sosial, budaya pop, dan seni komunitas. Kolaborasi antara tokoh agama, filsuf, pendidik, dan aktivis sosial sangat penting dalam membangun sinergi antarkomunitas. Dengan pendekatan partisipatif dan dialogis, masyarakat sipil dapat menjadi ujung tombak transformasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap civil society, yang menjadi motor penggerak integrasi nilai dalam masyarakat. Namun, masyarakat sipil juga harus aktif dalam mengembangkan inisiatif lokal dan budaya damai di tengah masyarakat.

Model Integrasi dalam Praktik

Beberapa model integrasi ketiga unsur ini dapat ditemukan dalam berbagai praktik sosial: Pendidikan multikultural, yang menggabungkan refleksi filosofis, nilai Pancasila, dan pemahaman lintas agama. Forum lintas iman, yang menjadi wadah diskusi terbuka dan dialog teologis antar pemuka agama. Gerakan sosial berbasis agama, seperti Muhammadiyah dan NU yang menggabungkan nilai-nilai teologi dan Pancasila dalam kerja sosial. Model-model ini menunjukkan bahwa integrasi bukanlah wacana abstrak, melainkan dapat diwujudkan dalam tindakan konkret yang berorientasi pada keadilan sosial dan perdamaian.

Peran Negara dan Masyarakat Sipil

Negara memiliki peran penting dalam menginstitusionalisasi integrasi ini, melalui: Kurikulum pendidikan, yang mengajarkan filsafat kritis, Pancasila substantif, dan pemahaman lintas agama. Perundang-undangan, yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dukungan terhadap civil society, yang menjadi motor penggerak integrasi nilai dalam masyarakat. Namun, masyarakat sipil juga harus aktif dalam mengembangkan inisiatif lokal dan budaya damai di tengah masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Integrasi filsafat, Pancasila, dan teologi bukanlah sekadar wacana ideal, tetapi keniscayaan dalam membangun masyarakat majemuk yang adil dan damai. Ketiganya harus dipahami bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi sebagai elemen yang saling melengkapi: filsafat menyediakan kerangka kritis, Pancasila sebagai dasar etika nasional, dan teologi sebagai inspirasi moral transendental. Hanya dengan sinergi ketiganya, Indonesia dapat bertahan dan berkembang sebagai bangsa yang bersatu dalam perbedaan, kuat dalam keberagaman. Integrasi filsafat, Pancasila, dan teologi dalam masyarakat majemuk: Membutuhkan pendekatan dialogis dan holistik. Harus berorientasi pada nilai-nilai

kemanusiaan universal. Perlu didukung oleh pendidikan, media, dan kepemimpinan sosial-politik yang arif.

Dalam masyarakat yang plural, kebijaksanaan kolektif lahir dari pertemuan antara akal budi (filsafat), kesepakatan bersama (Pancasila), dan nilai-nilai spiritual (Teologi). Filsafat, Pancasila, dan Teologi bukanlah tiga entitas yang berdiri sendiri. Ketiganya saling melengkapi dalam membangun masyarakat majemuk yang harmonis. Dengan pendekatan yang reflektif, inklusif, dan berlandaskan nilai kemanusiaan, ketiganya mampu membentuk masyarakat yang adil, damai, dan toleran. Integrasi filsafat, Pancasila, dan teologi sangat penting dalam membangun masyarakat majemuk yang inklusif, adil, dan bermartabat. Ketiganya bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan bisa saling melengkapi untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Beerling, R. F. (2020). *Pengantar filsafat: Refleksi atas hakikat dan prinsip kenyataan*. Obor.
- Darmawan, H. (2022). *Filsafat sosial dan transformasi masyarakat Indonesia*. Kanisius.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and method* (2nd ed.). Continuum.
- Haryatmoko. (2022). *Etika politik dan kekuasaan di era disrupsi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Haryono, A. (2020). Filsafat hikmat dalam perspektif Alkitab: Integrasi nalar dan iman. *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia*, 5(2), 45–60. <https://doi.org/10.34307/jtki.v5i2.187>
- Kant, I. (2018). *Critique of pure reason* (Rev. ed.). Cambridge University Press.
- Kleden, I. (2019). *Masyarakat dan refleksi filsafat: Sebuah kritik atas rasionalitas modern*. Kompas.
- Kurniawan, R. (2022). Hermeneutika dan tantangan pluralitas: Belajar dari Gadamer dan Ricoeur. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1), 23–39. <https://doi.org/10.31294/jfi.v6i1.245>
- Mangunhardjana, A. (2020). *Belajar berpikir filsafati: Dasar dan arah pendidikan nilai*. Kanisius.
- Manullang, E. (2021). *Pancasila dan tantangan pluralitas bangsa: Pendekatan humanisme transformatif*. Kanisius.
- Plantinga, A. (2020). *Faith and rationality: Reason and belief in God*. Eerdmans. <https://doi.org/10.2307/jj.21995799>
- Riyanto, A. (2021). *Filsafat dan teologi dalam dialog kebangsaan: Membangun etos multikultural Indonesia*. Dioma Press.
- Riyanto, A. (2022). *Hermeneutika dan persahabatan: Gadamer, Ricoeur, Levinas*. Kanisius.
- Siahaan, J. (2023). Filsafat dan kesadaran pluralitas dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Filsafat Nusantara*, 8(1), 55–71. <https://doi.org/10.36728/jfn.v8i1.365>

- Siahaan, J. (2023). Integrasi Pancasila dan teologi Kristen dalam membangun perdamaian sosial di Indonesia. *Jurnal Teologi dan Filsafat Indonesia*, 9(2), 101–115. <https://doi.org/10.34307/jtifi.v9i2.389>
- Sulaeman, A., & Kurniawan, R. (2020). Pluralisme dan tantangan kebangsaan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik*, 14(1), 23–35. <https://doi.org/10.47532/jikp.v14i1.247>
- Suseno, F. M. (2020). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Kanisius.
- Wahyudi, R. (2024). Filsafat sebagai jalan hidup: Relevansi etika rasional di era disrupsi. *Jurnal Humaniora dan Filsafat Modern*, 10(1), 12–29. <https://doi.org/10.47532/jhfm.v10i1.412>